J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Peran Partispasi Politik Pada Lanjut Usia Di Desa Banding Anyar Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024

Alvina Oktaviani[1*], Ainur Ropik[2], Dumyati[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
E-mail: 2110702008 @radenfatah.ac.id*

Article History:
Received: 06 Februari 2025
Revised: 26 Maret 2025
Accepted: 04 April 2025

Keywords: *Partisipasi Politik, lanjut Usia, Pemilihan Presiden*

Abstract: *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk partisipasi politik lanjut usia pada pemilihan presiden 2024 di Desa Banding Anyar Kabupaten Ogan Komering Ilir dan hambatan yang dihadapi oleh lansia dalam berpartisispasi pada pilpres 2024. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi politik Lansia di Desa Banding Anyar pada pemilihan presiden tahun 2024 cenderung aktif. Lansia di Desa Banding Anyar umunya terlibat dalam bentuk partispasi konvensional,dimana mereka menunjukan bahwa usia tidak menjadi penghalang untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dukungan berupa aksesibilitas fasilitas dan informasi yang lebih insklusif dapat meningkatkan partisipasi politik lansia di masa mendatang.Dalam penelitian ini juga menemukan adanya hambatan seperti keterbatasan fisik, lokasi TPS yang jauh,serta pengaruh keluarga dan likungan yang terkadang mebatasi partisipasi politik lansia*

PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang menjadi aspek fundamental dalam proses demokrasi. Partisipasi ini memiliki fungsi dan makna yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi, karena pembangunan politik yang baik lahir dari keterlibatan aktif masyarakat dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, baik dalam pemilihan presiden maupun kepala desa, menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan demokrasi dan kedaulatan rakyat (Olii, 2018).

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik memungkinkan masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik dan mengawasi jalannya pemerintahan (Budiardjo, 2008). Salah satu cara mengukur keberlangsungan demokrasi adalah dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi politik warga negara, semakin kuat karakter demokrasi yang terbentuk. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi politik dapat menjadi sinyal adanya permasalahan dalam sistem demokrasi suatu negara. Di sisi lain,

partisipasi politik juga mencerminkan upaya warga negara dalam mendukung kandidat tertentu atau memenangkan kontestasi pemilu (Ardina, 2018).

Konsep demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat mendefinisikan partisipasi sebagai hak dasar setiap individu untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menegaskan bahwa rakyat merupakan pemegang tertinggi kedaulatan yang dapat mereka wujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi politik, seperti pemilihan umum. Pemilu sendiri merupakan salah satu sarana demokrasi dalam membentuk sistem pemerintahan yang berdaulat (Winardi, 2008).

Dalam konteks partisipasi politik, kelompok lanjut usia sering kali menghadapi berbagai kendala. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, seseorang dikategorikan sebagai lansia apabila telah mencapai usia 60 tahun ke atas (Maryam, 2008). Sementara itu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 1999), lanjut usia dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu usia pertengahan (45–59 tahun), lanjut usia (60–74 tahun), lanjut usia tua (75–90 tahun), dan usia sangat tua (di atas 90 tahun).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah menikah, atau pernah menikah. Dengan demikian, pemilih dalam pemilu mencakup seluruh warga negara yang memenuhi syarat, termasuk pemilih lansia. Dalam kategori pemilih, mereka yang berusia di bawah 21 tahun diklasifikasikan sebagai pemilih pemula, sedangkan mereka yang berusia 60 tahun ke atas dikategorikan sebagai pemilih lansia.

Data menunjukkan bahwa pada Pemilihan Presiden 2024, partisipasi pemilih dengan rentang usia 17–30 tahun mencapai 31,23 persen, kelompok usia 31–40 tahun sebesar 20,70 persen, dan pemilih berusia di atas 40 tahun mencapai 48,07 persen. Persentase ini menunjukkan bahwa pemilih dari kelompok usia yang lebih tua memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lebih muda.

Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik meliputi kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau wakil rakyat. Kesadaran politik mencakup pemahaman individu terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, sementara kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Tingginya kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah cenderung meningkatkan partisipasi politik, sedangkan rendahnya kesadaran dan kepercayaan dapat menyebabkan apatisme politik.

Penelitian ini berfokus pada tingkat partisipasi pemilih lansia dalam pemilihan presiden 2024, khususnya di Desa Banding Anyar, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemilih lansia menghadapi berbagai tantangan dalam berpartisipasi, seperti keterbatasan fisik, kurangnya pemahaman terhadap sistem pemilu, serta sikap apatis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik lansia serta peran mereka dalam proses demokrasi.

LANDASAN TEORI

Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu pilar demokrasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Sebagai negara demokratis, Indonesia menjadikan pemilu sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sejak pemilu pertama pada tahun 1955, sistem pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, terutama setelah reformasi 1999 yang membuka

ruang demokrasi lebih luas. Salah satu perubahan terbesar adalah penerapan pemilihan presiden secara langsung sejak 2004, yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Pemilu 2024 menjadi tantangan baru karena penyelenggaraannya yang lebih kompleks, mencakup pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah secara serentak. Tantangan utama dalam pemilu ini meliputi kesiapan logistik, penggunaan teknologi, serta peningkatan partisipasi pemilih, khususnya generasi muda dan masyarakat di daerah terpencil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen bertanggung jawab memastikan pemilu berjalan transparan dan adil, tanpa intervensi pihak mana pun.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu tidak hanya menjadi hak, tetapi juga bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dengan memilih pemimpin yang berintegritas, masyarakat turut berperan dalam menentukan arah kebijakan negara. Selain itu, pemilu yang berkualitas harus memastikan adanya pilihan kebijakan yang beragam, memungkinkan rakyat meminta pertanggungjawaban dari pejabat terpilih, serta mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah tindakan warga negara dalam memengaruhi keputusan pemerintah, baik sebagai individu maupun kelompok. Keterlibatan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti konvensional maupun non-konvensional, serta dilakukan secara terorganisir atau spontan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif. Huntington (1994:4) menekankan bahwa partisipasi politik merupakan karakteristik utama dari modernisasi politik dan berperan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu, warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka.

Salah satu kelompok yang mengalami perubahan signifikan dalam partisipasi politik adalah lansia. Seiring perubahan sosial, politik, dan kebijakan pemilu, lansia mulai lebih diperhatikan dalam proses demokrasi. Pada era awal kemerdekaan, partisipasi politik lansia cenderung rendah karena keterbatasan akses informasi dan dominasi pemuda. Namun, sejak Reformasi 1999, peluang bagi lansia untuk berpartisipasi dalam pemilu semakin terbuka. Pemilu 1999 menjadi titik balik yang menandai meningkatnya kesadaran akan hak suara lansia. Upaya untuk mempermudah akses mereka terus dilakukan, seperti penyediaan fasilitas ramah lansia di TPS dan layanan Kotak Suara Keliling (KSK). Pada Pemilu 2019 dan menjelang Pemilu 2024, kebijakan yang lebih inklusif, dukungan teknologi informasi, serta perhatian pemerintah terhadap inklusi lansia semakin ditingkatkan (KPU, 2024).

Legitimasi pemerintahan sangat bergantung pada partisipasi politik masyarakat, yang mencerminkan preferensi serta kepentingan mereka dalam memilih pemimpin. Almond mengklasifikasikan partisipasi politik menjadi dua jenis, yaitu konvensional, seperti pemungutan suara dan keterlibatan dalam organisasi politik, serta non-konvensional, seperti petisi dan kampanye publik. Tujuan utama partisipasi politik adalah memengaruhi mekanisme pemerintahan, mengontrol jalannya sistem politik, serta memastikan keberlangsungan sistem secara demokratis.

Rush dan Althof (2003) membagi bentuk partisipasi politik ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari menduduki jabatan politik, menjadi anggota aktif atau pasif dalam organisasi, hingga keterlibatan dalam diskusi politik dan pemungutan suara. Sementara itu, Surbakti (1992)

mengelompokkan partisipasi politik menjadi aktif, seperti mengajukan usulan kebijakan dan memilih pemimpin, serta pasif, seperti mengikuti peraturan pemerintah. Tingkat partisipasi politik yang tinggi menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, sedangkan rendahnya partisipasi mengindikasikan kurangnya minat terhadap politik.

Menurut Conyers (1994), partisipasi masyarakat penting karena memberikan informasi mengenai kebutuhan lokal, meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan, dan mencerminkan hak demokrasi warga negara dalam menentukan arah pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi politik dalam pemilu tidak hanya menentukan kepemimpinan nasional, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi suatu negara. Masyarakat harus diberikan akses yang mudah untuk memilih, serta dapat menentukan pemimpin berkualitas berdasarkan keyakinan dan kepercayaan mereka.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk memahami situasi dan kondisi terkait peran partisipasi politik lanjut usia di Desa Banding Anyar, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada Pemilihan Presiden 2024.

Menurut Mukhtar (2013), penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai objek penelitian pada suatu waktu tertentu. Sementara itu, Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai peran partisipasi politik lanjut usia dalam pemilihan presiden di desa tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung partisipasi politik lanjut usia di Desa Banding Anyar pada Pemilihan Presiden 2024. Informan utama dalam observasi ini meliputi Kepala Desa, Kasi Pemerintahan Desa, satu anggota PPS, satu anggota KPPS, satu saksi dari salah satu pasangan calon presiden, dua warga masyarakat, dan tiga orang lanjut usia. Wawancara dilakukan dengan informan yang sama untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai keterlibatan politik mereka. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung, mencakup catatan tertulis, gambar, atau dokumen resmi terkait peristiwa yang diamati.

Penelitian ini berlokasi di Desa Banding Anyar, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan fokus pada partisipasi politik lanjut usia dalam pemilihan presiden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode induktif melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pertama, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, dilakukan kondensasi data dengan memilih, menyederhanakan, dan menyesuaikan informasi yang relevan. Data yang telah diklasifikasikan kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan analisis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat sementara dan dapat berkembang berdasarkan temuan data baru. Kesimpulan ini diverifikasi dengan meninjau kembali hasil reduksi dan penyajian data untuk memastikan relevansi dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Partisipasi Politik Lanjut Usia Pada Pemilihan Presiden 2024 di Desa Banding Anyar Kabupaten Ogan Komering Ilir

Peneliti menganalisis data dari wawancara untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait partisipasi politik lansia dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ansori, anggota panitia pemungutan suara (PPS), mengatakan bahwa:

"Partisipasi politik lansia pada tahun 2019 dan tahun 2024 sama tinggi partisipasi nya yang dimana pada tahun 2019 tergolong cukup tinggi karena di antara mereka yang merasa memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin bangsa. Sedangkan untuk tahun 2024 kami memperkirakan tingkat partisipasi lansia tetap tinggi meskipun ada beberapa perubahan akibat faktor usia, kesehatan, dan perbedaan dinamika politik."

Wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun lansia menghadapi kendala usia dan kesehatan, partisipasi mereka dalam politik diperkirakan tetap tinggi karena mereka merasa memiliki tanggung jawab dalam memilih pemimpin bangsa. Hal ini mencerminkan komitmen lansia terhadap demokrasi.

Ahmad Bakti, kepala desa Banding Anyar, menyatakan bahwa: "Menurut saya lansia berperan signifikan dalam partisipasi politik terutama pada pilpres tahun 2024. Para lansia adalah generasi yang memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang menjadi teladan bagi generasi muda dalam memberikan hak suara nya. Suara para lansia sangat berharga karena sering kali didasarkan pada pemahaman mendalam tentang sejarah dan perkembangan politik di Indonesia. Lansia juga sering berperan sebagai penggerak dalam keluarga sehingga keputusan politik mereka dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya untuk ikut serta berpartisipasi."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa lansia tidak hanya berfungsi sebagai pemilih yang cerdas tetapi juga sebagai penggerak perubahan dalam keluarga, menginspirasi generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik.

Bapak Jailani, seorang lansia yang berpartisipasi dalam Pilpres 2024, menyatakan: "Sejak dulu, saya merasa bahwa sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memberikan suara pada pemilihan presiden tanggung jawab saya bukan hanya sebatas di bilik suara pada saat pemilu. Saya ingin melihat betapa penting nya ikut berperan dalam kegiatan politik, karena masa depan bangsa bukan hanya ditentukan oleh pemimpin yang kita pilih saja tetapi juga oleh seberapa aktif kita berpartisipasi dalam pemilu, dengan terlibat baik dalam diskusi politik, kegiatan sosial, atau menyampaikan aspirasi. Walaupun kontribusi kecil, saya pikir itu penting."

Wawancara ini menunjukkan kesadaran yang kuat akan pentingnya berpartisipasi dalam proses politik selain menggunakan hak suara di bilik pemilu. Partisipasi dalam demokrasi harus lebih dari sekadar mengikuti pemilu; itu juga harus melibatkan diri dalam kegiatan seperti diskusi politik, kegiatan sosial, dan penyampaian aspirasi. Ibu Eka, masyarakat sekitar, mengungkapkan: "Partisipasi politik Lansia di Desa Banding Anyar ini sangat penting karena mereka adalah bagian dari masyarakat yang memiliki pengalaman panjang dalam perkembangan politik dan sejarah bangsa. Saya juga melihat bahwa banyak lansia yang antusias ikut serta dalam Pemilihan Presiden meskipun ada beberapa kendala seperti kesehatan atau transportasi."

Pernyataan ini menegaskan bahwa partisipasi politik lansia sangat berharga, dan meskipun ada tantangan, mereka tetap antusias berpartisipasi dalam Pemilu. Dukungan terhadap mereka diperlukan untuk memastikan partisipasi mereka tetap optimal.

Secara keseluruhan, meskipun lansia di Desa Banding Anyar menghadapi berbagai

tantangan, mereka tetap menunjukkan partisipasi aktif dalam Pemilu 2024, baik dengan memberikan suara maupun berpartisipasi dalam diskusi politik di keluarga dan komunitas mereka. Partisipasi ini sering didukung oleh keluarga dan masyarakat, yang membantu mereka untuk tetap terlibat dalam proses politik meskipun memiliki keterbatasan fisik.

Hambatan yang Dihadapi oleh Lansia dalam Berpartisipasi pada Pemilihan Presiden 2024 di Desa Banding Anyar Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dalam masyarakat, tujuan dan maksud dalam momen pemilihan umum (pemilu) sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk lansia, dapat berpartisipasi secara penuh. Tindakan-tindakan lansia dalam proses pemilu sering kali merupakan upaya rasional untuk mencapai hak mereka dalam memilih pemimpin bangsa. Dalam rangka menggali informasi terkait hambatan yang dialami lansia dalam proses partisipasi politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Desa Banding Anyar, penulis memulai wawancara dengan ibu Tahwila, seorang lansia yang tidak bisa hadir langsung ke TPS karena masalah kesehatan. Wawancara ini dilakukan pada Sabtu, 9 November 2024, pukul 15:00 WIB:

"Kondisi kesehatan saya sangat mempengaruhi saya untuk datang ke TPS langsung dikarenakan saya memiliki masalah pada kaki saya yang membuat saya tidak bisa berjalan jauh, tetapi meskipun saya sulit untuk datang langsung ke TPS, ada anggota KPPS dan PPS di sini yang datang langsung ke rumah supaya saya bisa memberikan hak suara saya."

Wawancara ini menggambarkan kesulitan yang dihadapi lansia saat berpartisipasi dalam pemilu, terutama terkait masalah kesehatan yang membatasi mobilitas mereka. Namun, dengan adanya dukungan langsung dari anggota KPPS dan PPS yang mendatangi rumah untuk membantu, hak suara lansia tetap terakomodasi dengan baik.

Selain itu, Ansori, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), memberikan penjelasan tentang upaya penyelenggara pemilu untuk menjamin aksesibilitas bagi lansia. Wawancara dilakukan pada Sabtu, 9 November 2024, pukul 18:45 WIB:

"Kami memastikan TPS ditempatkan di lokasi yang mudah diakses, seperti balai desa, sekolah, atau tempat yang berada di pusat pemukiman. Petugas KPPS juga siap membantu mengarahkan lansia dari pintu masuk hingga ke bilik suara. Sedangkan untuk lansia yang tidak bisa datang langsung ke TPS, kami menggunakan layanan Kotak Suara Keliling (KSK), yang di mana petugas kami mendatangi rumah warga yang tidak bisa datang langsung ke TPS untuk membantu proses pemungutan suara, hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tetap transparan dan sah."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu memberikan perhatian khusus pada kebutuhan lansia dengan menempatkan TPS di lokasi yang mudah dijangkau dan dengan adanya layanan Kotak Suara Keliling (KSK) yang mengunjungi rumah-rumah warga yang tidak dapat datang ke TPS.

Melissa, seorang saksi calon presiden yang ikut datang ke rumah warga untuk melakukan layanan Kotak Suara Keliling (KSK), menyatakan dalam wawancara yang dilakukan pada Minggu, 26 Januari 2025, pukul 09:30 WIB:

"Layanan kotak suara keliling ini cukup efektif dalam memastikan bahwa pemilih lanjut usia dan warga yang kesulitan datang ke TPS tetap dapat menggunakan hak pilih mereka. Banyak pemilih memiliki keterbatasan untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa harus datang ke TPS yang mungkin sulit dijangkau karena usia, masalah kesehatan, atau keterbatasan mobilitas. Meskipun saya pikir layanan ini bagus, masih ada beberapa masalah yang kami temui, seperti masalah waktu dan logistik. Misalnya, waktu yang lebih lama dihabiskan untuk mengunjungi satu per satu pemilih karena jarak antara rumah warga cukup jauh. Namun, secara keseluruhan, saya melihat

bahwa pemilih yang lansia merasa lebih terbantu dan lebih nyaman karena mereka memiliki kesempatan untuk memilih di rumah mereka sendiri dengan bantuan petugas dan saksi seperti saya. Selain itu, saya menyaksikan beberapa pemilih yang lansia menjadi lebih santai karena mereka merasa tidak terpengaruh oleh tekanan dan memiliki kemampuan untuk memilih dengan bebas di lingkungan rumah mereka sendiri. Meskipun ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, saya yakin layanan kotak suara keliling ini membantu memastikan hak pilih semua warga, khususnya lansia, tetap terakomodasi."

Wawancara ini menunjukkan bahwa layanan Kotak Suara Keliling (KSK) memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pemilih lansia, meskipun masih ada tantangan dalam hal waktu dan logistik. Layanan ini membantu pemilih lansia tetap dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan cara yang lebih fleksibel dan tanpa tekanan.

Bapak Ahmad Bakti, Kepala Desa Banding Anyar, menambahkan pada wawancara yang dilakukan pada Selasa, 21 Januari 2025, pukul 14:30 WIB:

"Saya rasa petugas pemilu desa ini cukup siap untuk melayani semua pemilih, termasuk mereka yang lansia. Untuk memastikan mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pemilih lansia, kami telah mempersiapkan petugas pemilu dengan pelatihan yang meningkatkan pemahaman mereka tentang kebutuhan khusus pemilih lansia, baik dari segi fisik maupun tentang proses pemilu. Selain itu, kami telah menyiapkan fasilitas pendukung, seperti jalur khusus di TPS, agar lanjut usia lebih mudah mengakses tempat pemungutan suara. Di setiap TPS, ada petugas yang bertanggung jawab untuk membantu lanjut usia, baik dengan memberikan penjelasan tentang prosedur maupun dengan menawarkan bantuan. Dengan perhatian khusus ini, kami berharap para lansia di desa kami akan merasa lebih nyaman dan dibantu saat menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024."

Dalam wawancara ini, Bapak Ahmad Bakti menjelaskan upaya desa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pemilih lansia, termasuk pelatihan khusus untuk petugas pemilu dan penyediaan fasilitas pendukung seperti jalur khusus di TPS.

Selain itu, Bapak Syarifudin, Kasi Pemerintahan Desa Banding Anyar, menjelaskan tantangan lain yang dihadapi lansia, termasuk kesulitan mobilitas, pendengaran, dan penglihatan yang mempengaruhi partisipasi mereka. Wawancara dilakukan pada Sabtu, 25 Januari 2025, pukul 19:00 WIB:

"Kami mencatat beberapa masalah yang terkait dengan kondisi kesehatan dan fisik Lansia, yang tentu saja berdampak pada kemampuan mereka untuk mengambil bagian dalam pemilu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, beberapa orang tua menghadapi masalah mobilitas, menghadapi kesulitan berjalan jauh ke TPS atau berdiri lama di antrian. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kami. Selain itu, ada juga lansia yang mengalami masalah pendengaran atau penglihatan, yang memerlukan waktu lebih lama untuk memahami proses pemilu, seperti membaca surat suara atau mendengar arahan dari petugas pemilu. Oleh karena itu, kami berusaha memberikan perhatian tambahan, seperti menyediakan petugas yang tersedia untuk membantu mereka secara langsung. Kami menyadari bagaimana tidak semua lansia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan ini, terutama mereka yang tinggal di tempat yang lebih terpencil. Untuk itu, kami terus berupaya mencari solusi agar semua lansia tetap dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa hambatan besar."

Wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai masalah yang dihadapi oleh lansia, petugas pemilu berupaya memberikan dukungan tambahan untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi dalam pemilu tanpa hambatan besar.

Dengan wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa partisipasi lansia dalam pemilu sangat

bergantung pada adanya dukungan akses yang baik, seperti fasilitas yang ramah lansia, bantuan dari petugas, dan layanan Kotak Suara Keliling (KSK) untuk mereka yang mengalami keterbatasan fisik atau mobilitas. Dukungan tersebut memastikan bahwa lansia dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman dan tanpa hambatan yang signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai partisipasi politik lansia pada pemilihan presiden tahun 2024 di Desa Banding Anyar, Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk Partisipasi politik Lansia di Desa Banding Anyar pada pemilihan presiden tahun 2024 merupakan partisipasi aktif. Lansia di Desa Banding Anyar umumnya terlibat dalam bentuk partisipasi konvensional, dimana mereka menunjukkan bahwa usia tidak menjadi penghalang untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dukungan berupa aksesibilitas fasilitas dan informasi yang lebih inklusif dapat meningkatkan partisipasi politik lansia di masa mendatang.
2. Hambatan yang dihadapi lansia dalam partisipasi politik adalah keterbatasan fisik, lokasi TPS yang jauh ,serta pengaruh keluarga dan lingkungan yang terkadang membatasi partisipasi politik lansia

DAFTAR REFERENSI

Bogdan, R., & Taylor, S. J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Budiardjo, M. (1982). Partisipasi dan partai politik: Sebuah bunga rampai. Jakarta: PT. Gramedia.

Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik (hal. 367). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hardani, et al. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif (hal. 123). Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.

Huntington, S. P. (1994). Partisipasi politik di negara berkembang (hal. 4). Bengkulu: Rineka Cipta.

Maryam, D. (2008). Mengenal usia lanjut dan perawatannya. Jakarta: Penerbit Salemba Medika.

Moleong, L. J. (2012). Metode penelitian kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mukhtar. (2013). Metode praktis penelitian deskriptif kualitatif. Jakarta: GP Press Group.

Murdiyatmoko, J. (2007). Sosiologi: Memahami dan mengkaji masyarakat (hal. 25). Bandung: Grafindo Media Pratama.

Riyadi, V. G. (2012). Kajian dan mekanisme perlindungan. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Sugiyono. (2010). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif (hal. 335). Bandung: Alfabeta.

Winardi. (2008). Dinamika politik hukum (hal. 355). Malang: Setara Press.

Febrianty, A. (2012). Pengaruh role conflict, role ambiguity, dan work-family. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi, 2(3), 320.

Olii, R. R. (2018). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan pada Pilkada Kota Palu tahun 2015. EDU CIVIC, 6(1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.